

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

B. INFLASI BULAN JANUARI 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 kota pantuan IHK yaitu Kota Pangkalpinang dengan inflasi sebesar 1,17 persen dan Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) dengan inflasi sebesar 1,03 persen pada Januari 2021. Dengan demikian, gabungan 2 kota pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 1,12 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,58 pada Desember 2020 menjadi 105,75 pada Januari 2021. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,23 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,10 persen. Sementara itu kelompok yang mengalami deflasi yakni kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 0,62 persen. Pada bulan Februari 2021 Bangka Belitung mengalami deflasi 0,11 persen, inflasi tahun kalender 2021 sebesar 1,12 persen, dan Inflasi Tahun ke Tahun (yoy) (Feb 21 thd Feb 20) sebesar 2,11 persen, merupakan gabungan dari Kota Pangkalpinang deflasi 0,33 persen (andil deflasi terbesar: daging ayam ras) dan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 0,28 persen (andil inflasi terbesar: ikan selar). Pada Bulan Maret 2021 Bangka Belitung mengalami deflasi 0,14 persen, Inflasi Tahun Kalender 2021 0,87 persen dan % Inflasi Tahun ke Tahun (yoy) (Mar 21 thd Mar 20) sebesar 2,06 persen, merupakan gabungan dari 2 kota yaitu Kota Pangkalpinang mengalami deflasi 0,12 persen (andil deflasi terbesar: mobil) dan Kota Tanjungpandan deflasi 0,18 persen (andil deflasi terbesar: ikan bulat).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, sumber tekanan inflasi di Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Pemerintah, tetapi juga berasal dari sisi penawaran yang terkait dengan masalah pada produksi, distribusi, kebijakan pemerintah, maupun faktor eksternal seperti terjadinya inflasi di negara lain (imported inflation). Oleh karenanya, untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil tersebut diperlukan koordinasi dari seluruh otoritas yang terkait yang diwujudkan dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kisaran $3,5 \pm 1$ persen dan Pengendalian Inflasi Volatile Food maksimal di kisaran 4-5 persen melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas, maka pada Triwulan I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Bank Indonesia telah berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya mensinkronkan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun 2021.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4.

Oleh karena itu untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sesuai roadmap pengendalian inflasi 2019-2021 perlu didorong : 1. Pentingnya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi; 2. Pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan daerah termasuk mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antar daerah; dan 3. Pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap menjaga berjalannya mekanisme pasar dalam mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Ke depan, berbagai upaya pengendalian inflasi yang saat ini masih menghadapi banyak tantangan perlu diperkuat, salah satunya melalui pengoptimalan berbagai forum koordinasi antarotoritas dalam mengatasi berbagai kendala struktural perekonomian yang turut berkontribusi pada angka inflasi.